

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe Penelitian	9
1.5.2 Pendekatan Masalah	9
1.5.3 Bahan Hukum	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	11
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	11
BAB II SANKSI PENGUSAHA YANG TIDAK MENYEDIAKAN RUANG LAKTASI BAGI PEKERJA PEREMPUAN MENYUSUI	13

2.1	Pengertian dan Ketentuan Mengenai Hak Menyusui Pada Pekerja Perempuan Menyusui Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia	13
2.2	Perjanjian Kerja Bersama Yang Tidak Mencantumkan Hak Menyusui .	31
2.3	Ketentuan Sanksi Bagi Pengusaha Yang Tidak Menyediakan Fasilitas Laktasi Bagi Pekerja Perempuan Menyusui	34
2.4	Implementasi Ketentuan Mengenai Hak Menyusui Pada Pekerja Perempuan Menyusui.....	37
BAB III UPAYA HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN MENYUSUI YANG TIDAK DIPENUHI HAKNYA		40
3.1	Perselisihan Hubungan Industrial	40
3.2	Penyelesaian Perselisihan Hak dan Perselisihan Kepentingan	42
3.3	Upaya Hukum Bagi Pekerja Perempuan Menyusui yang Tidak Dipenuhi Haknya	49
BAB IV PENUTUP		53
4.1	Kesimpulan	53
4.2	Saran	54
DAFTAR BACAAN		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23);
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3143);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441).